

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan batasan aset dan omzet tertentu (Djuniardi *et al.*, 2022). UMKM telah diakui secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai pilar penting perekonomian nasional. Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2025), UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM yang bersifat fleksibel dan adaptif juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat pemerataan pendapatan masyarakat (Tamba *et al.*, 2024; Farisi *et al.*, 2022)

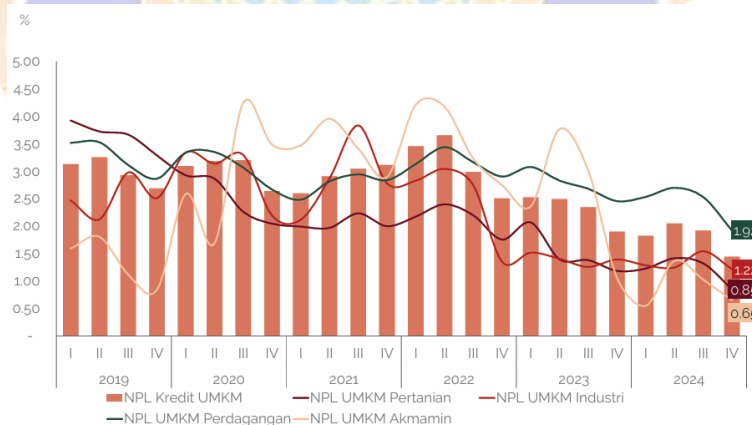
UMKM menghadapi berbagai tantangan struktural di balik peran strategisnya, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan usaha (Dewi *et al.*, 2023). Kinerja keuangan menjadi aspek yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan usaha untuk bertahan, berkembang, dan menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang (Ayu & Dewi, 2021). Pada Provinsi Bali, sektor perdagangan menempati posisi strategis sebagai penggerak utama aktivitas UMKM sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Jumlah UMKM Aktif Per Sektor Usaha Tahun 2025

No	Sektor	Jumlah UMKM Aktif
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7.268
2.	Industri Pengolahan	2.883
3.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.653
4.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	952
5.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	628

(Sumber : Disdagperinkop-UKM, 2025)

Berdasarkan tabel 1.1, sektor perdagangan besar dan eceran menempati peringkat pertama dengan jumlah UMKM aktif terbanyak di Provinsi Bali pada tahun 2025, yaitu sebanyak 7.268 unit. Meskipun menjadi tulang punggung UMKM, sektor ini menghadapi tantangan serius dalam aspek pembiayaan yang tercermin dari tingginya tingkat *Non-Performing Loan* (NPL). Tingkat NPL sektoral UMKM di Provinsi Bali disajikan pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral Provinsi Bali  
(Sumber : Bank Indonesia, 2025)

Berdasarkan gambar 1.1, tren perkembangan *Non-Performing Loan* (NPL) menurut sektor usaha, sektor perdagangan mencatat tingkat NPL tertinggi pada

tahun 2024, yaitu sebesar 1,92%, dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kredit macet paling banyak terjadi pada UMKM sektor perdagangan. Tingginya NPL mencerminkan masih adanya kesulitan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban keuangan, khususnya kepada lembaga pembiayaan formal. Menurut Safitri *et al.* (2024), kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal lembaga keuangan maupun faktor eksternal yang berasal dari debitur, di mana faktor debitur menjadi penyebab yang paling dominan terhadap rendahnya kinerja keuangan. Sejalan dengan kondisi tersebut, data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki jumlah debitur program kredit pemerintah terbanyak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 3.657 orang. Namun, tingginya jumlah penerima kredit tersebut belum diikuti oleh kualitas pembiayaan yang baik, karena Kabupaten Buleleng justru menempati peringkat pertama dalam tingkat NPL kredit UMKM di Provinsi Bali, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2  
Perkembangan NPL Kredit UMKM Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kab/Kota	NPL (%)				Rata-rata (%)
		I	II	III	IV	
1.	Kab. Buleleng	2,77	2,95	3,12	2,58	2,86
2.	Kab. Karangasem	2,82	3,12	2,67	1,61	2,56
3.	Kab. Jembrana	1,87	2,95	2,82	2,19	2,46
4.	Kota Denpasar	2,18	2,62	2,68	1,96	1,87
5.	Kab. Tabanan	1,85	1,8	1,53	1,19	1,59
6.	Kab. Klungkung	1,14	2,67	1,22	1,12	1,54
7.	Kab. Badung	1,42	1,16	1	0,8	1,10
8.	Kab. Gianyar	0,81	0,83	0,8	0,6	0,76
9.	Kab. Bangli	0,65	0,52	0,62	0,3	0,52

(Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Bali, 2025)

Tabel 1.2., menampilkan data tingkat NPL UMKM berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten

Buleleng memiliki NPL tertinggi pada triwulan IV 2024. Nilai NPL di wilayah tersebut tercatat sebesar 2,58%. Rata-rata NPL Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2024 mencapai 2,86%. Angka ini lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menunjukkan tingginya risiko kredit bermasalah pada pelaku UMKM di Buleleng.

Kabupaten Buleleng menunjukkan dinamika pertumbuhan UMKM yang cukup aktif. Selama periode 2021 hingga 2024, jumlah UMKM di wilayah ini mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Data pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3  
Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah UMKM
1.	2021	57.216
2.	2022	66.368
3.	2023	79.470
4.	2024	89.250

(Sumber : Disdagperinkop-UKM, 2024)

Berdasarkan tabel 1.3., jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng meningkat dari 57.216 unit pada tahun 2021 menjadi 89.250 unit pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas kinerja keuangan yang baik, yang tercermin dari tingginya rasio NPL, padahal secara normatif peningkatan jumlah UMKM seharusnya berjalan seiring dengan kemampuan menjaga stabilitas usaha dan solvabilitas yang sehat (Hendratmoko, 2021; Ross *et al.* 2015). Tingginya NPL di Kabupaten Buleleng menunjukkan lemahnya kinerja keuangan UMKM, khususnya dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sehat dan berisiko menurunkan keberlanjutan usaha (Tri Yusnita *et al.* 2023; Fadilah *et al.* 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Utama, selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Bali Nasional Akuntan di Kecamatan Sukasada, terungkap bahwa di tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam keterlambatan pembayaran kredit oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini relevan dengan temuan Dewi & Masdiantini (2022) yang menunjukkan bahwa koperasi di Buleleng cenderung menyelesaikan kredit bermasalah melalui pendekatan kekeluargaan. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai sosial yang kuat, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan risiko kredit macet. Pernyataan ini diperkuat oleh dua pelaku usaha, yaitu Ibu Ketut Sudiani dan Ibu Sri Rejeki, yang menyatakan bahwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit karena menurunnya daya beli konsumen dan penurunan pendapatan usaha secara signifikan.

Permasalahan dalam kinerja keuangan UMKM tentu tidak berdiri sendiri, terdapat berbagai faktor yang memengaruhinya, baik yang berasal dari kemampuan internal pelaku usaha maupun dari tekanan lingkungan eksternal (Fadilah *et al.*, 2021). Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan bagaimana UMKM mampu bertahan dan meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat adalah teori *Dynamic Capability*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Teece *et al.* (1997) yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan untuk merasakan perubahan, menangkap peluang, serta menata ulang sumber daya yang dimiliki agar tetap relevan dan kompetitif. *Dynamic Capability* menekankan pentingnya kapasitas adaptif usaha dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang tidak menentu (Teece *et al.*, 1997).

Dalam kerangka *Dynamic Capability*, usaha yang unggul bukanlah usaha dengan sumber daya terbesar, melainkan usaha yang mampu menggunakan sumber daya tersebut secara tepat dan fleksibel untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. Teece *et al.* (1997) menjelaskan bahwa kemampuan dinamis mencakup tiga proses utama, yaitu *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring*. *Sensing capability* menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman di lingkungan bisnis, *seizing capability* menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada melalui pengambilan keputusan strategis, sedangkan *reconfiguring capability* berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengonfigurasi ulang dan mengembangkan sumber daya agar tetap sesuai dengan tuntutan pasar. Ketiga proses ini berfungsi secara berkesinambungan dan saling melengkapi dalam menciptakan keunggulan kompetitif serta mendukung peningkatan kinerja keuangan.

*Financial attitude* merupakan salah satu faktor internal yang berperan penting dalam membentuk kemampuan dinamis UMKM. *Financial attitude* mencerminkan cara pandang pelaku usaha dalam mengelola keuangan, termasuk dalam menilai risiko, mengambil keputusan keuangan, dan menentukan prioritas penggunaan modal (Fitriyah *et al.*, 2023). Dalam kerangka *Dynamic Capability*, *financial attitude* mendukung proses *sensing* dan *seizing* karena membantu pelaku UMKM mengenali kondisi keuangan usahanya serta mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, yaitu ARL Crochet, diketahui bahwa pengelolaan keuangan pribadi dan usaha masih belum dipisahkan secara jelas. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan masih terbatas. Kondisi serupa juga ditemukan pada UMKM di Desa Baktiseraga, Kabupaten Buleleng, yang mengalami kendala dalam pencatatan keuangan (Masdiantini *et al.*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan masih menjadi isu nyata pada UMKM di wilayah Buleleng.

Temuan ini juga didukung oleh berbagai penelitian. Penelitian menurut Hanasri *et al.* (2023) dan Elisabeth & Ruzikna (2024) menemukan bahwa *financial attitude* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan penelitian yang menghasilkan temuan yang berbeda yakni penelitian oleh Sukmawati & Amalia (2024) dan Hayati & Budi (2023) menyatakan bahwa *financial attitude* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM.

Faktor yang juga berperan dalam memengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah adanya perkembangan teknologi digital (Julianto *et al.*, 2021). Salah satu bentuk inovasi teknologi tersebut adalah *payment gateway* berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yakni sistem pembayaran digital yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (Syahda *et al.*, 2024). Dengan hanya satu kode QR, pelaku usaha tidak lagi perlu menyediakan banyak kode dari berbagai aplikasi, sehingga mempermudah transaksi bagi konsumen (Rangkuti, 2021). Sistem ini memungkinkan seluruh aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun *non-bank*, untuk digunakan di berbagai tempat usaha yang telah bekerja sama dengan QRIS, menjadikannya lebih praktis dan efisien dibanding metode pembayaran digital konvensional (Maharani & Yuliati, 2024; Herawati *et al.*, 2020) Dalam *Dynamic Capability*, pemanfaatan QRIS mencerminkan *seizing capability* melalui adopsi peluang digitalisasi

pembayaran serta *reconfiguring capability* melalui penyesuaian dan penataan ulang sistem transaksi usaha yang berpotensi meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Dengan kemudahan yang ditawarkan, QRIS memiliki potensi besar dalam mendukung kinerja UMKM (Perdana & Sinarwati, 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat adopsi QRIS di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bali (2025), tingkat adopsi QRIS di Kabupaten Buleleng hanya mencapai 7% dari total 911.635 merchant di Provinsi Bali. Angka ini merupakan salah satu yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil survei awal terhadap 30 pelaku UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng, di mana hanya 4 pelaku usaha yang telah menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, sementara 26 lainnya masih bergantung pada transaksi tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2020) dan Lubis & Harahap (2022) menunjukkan bahwa penggunaan *payment gateway* berbasis QRIS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Sukma *et al.* (2024) dan Hermawan & Purnamawati (2024) di mana *payment gateway* berbasis QRIS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM.

Inovasi produk merupakan salah satu sumber daya internal yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM (Onvango *et al.*, 2025). Dapat diwujudkan melalui upaya menciptakan atau mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar (Hadi, 2023). Dalam *Dynamic Capability*, inovasi produk mencerminkan *reconfiguring capability*, yaitu kemampuan pelaku UMKM dalam

menata ulang desain, fungsi, dan sumber daya produk agar tetap relevan dan kompetitif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Ketut Eni, seorang pengrajin dan pedagang bokor, yang enggan berinovasi karena keterbatasan dana dan kekhawatiran terhadap penerimaan pasar, padahal inovasi merupakan kunci penciptaan nilai tambah dan fungsi utama kewirausahaan (Nenta & Astuti 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Onvango *et al.* (2025) dan Hadi (2023) menyatakan bahwa inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Namun, tidak semua hasil studi menunjukkan pengaruh yang serupa. Penelitian oleh Pondok *et al.* (2023) dan Daswal *et al.* (2023) yang mengungkapkan bahwa inovasi produk tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

Penelitian ini mengacu pada studi Lestari *et al.* (2020) yang mengkaji pengaruh *payment gateway* terhadap kinerja keuangan UMKM menggunakan pendekatan *transaction cost theory* dan menemukan bahwa sistem pembayaran digital mampu meningkatkan efisiensi serta kinerja usaha. Penelitian tersebut masih terbatas pada satu variabel independen dan belum mempertimbangkan faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Penelitian oleh Lestari *et al.* (2020) dilakukan pada UMKM di kawasan perkotaan Palembang Indah Mall dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, sedangkan penelitian ini difokuskan pada UMKM di Kabupaten Buleleng yang memiliki karakteristik lebih tradisional dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi keuangan serta sikap dalam mengelola keuangannya.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) melalui pengembangan model yang lebih komprehensif dengan menambahkan dua variabel independen, yaitu

*financial attitude* dan inovasi produk, di samping variabel *payment gateway* berbasis QRIS. Pendekatan teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan menerapkan teori *Dynamic Capability*. Ketiga variabel independen dipandang sebagai bentuk kemampuan dinamis yang membantu UMKM menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis dan memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Tingginya tingkat NPL UMKM digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator makro yang mencerminkan adanya permasalahan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Namun, penelitian ini tidak menguji NPL sebagai variabel, melainkan memfokuskan analisis pada faktor internal UMKM pada tingkat mikro, yaitu *financial attitude*, penggunaan *payment gateway* berbasis QRIS, dan inovasi produk yang secara teoritis dan empiris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng menghadapi tekanan nyata dalam kinerja keuangan yang tercermin dari rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan serta keterbatasan adaptasi terhadap teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan adaptif pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya keuangan, memanfaatkan teknologi pembayaran digital, dan mendorong inovasi produk agar mampu bersaing dalam dinamika pasar yang kompetitif.

Studi terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh *financial attitude*, *payment gateway*, dan inovasi produk terhadap kinerja keuangan UMKM, sehingga diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan mekanisme adaptasi dan perubahan organisasi secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model berbasis *Dynamic Capability*

*Theory Teece et al.* (1997) untuk mengkaji peran kemampuan dinamis UMKM dalam mengelola keuangan, beradaptasi terhadap digitalisasi sistem pembayaran, dan melakukan inovasi produk terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh *Financial attitude*, *Payment Gateway* Berbasis QRIS, dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Tingginya tingkat NPL pada sektor perdagangan di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2025), sektor perdagangan tercatat memiliki tingkat NPL tertinggi di antara seluruh sektor usaha, yakni sebesar 1,92% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya risiko kredit bermasalah di kalangan pelaku UMKM. Laporan Perekonomian Provinsi Bali (2025), mengungkap bahwa Kabupaten Buleleng mencatatkan rata-rata NPL tertinggi di provinsi tersebut, yaitu sebesar 2,86% sepanjang tahun 2024. Angka ini mengindikasikan adanya tekanan serius terhadap stabilitas keuangan pelaku usaha di wilayah tersebut

2. Pertumbuhan jumlah UMKM tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja keuangan

Berdasarkan data Disdagperinkop-UKM Kabupaten Buleleng (2024), jumlah UMKM meningkat dari 57.216 unit pada tahun 2021 menjadi 89.250 unit pada tahun 2024. Walaupun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku usaha,

fakta tingginya rasio NPL menunjukkan bahwa banyak di antara pelaku masih mengalami kesulitan dalam mengelola kewajiban keuangan. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan kuantitas UMKM belum sejalan dengan peningkatan kualitas manajemen keuangan dan kemampuan menjaga solvabilitas usaha.

3. Kemampuan pengelolaan keuangan pelaku UMKM masih rendah, mencerminkan lemahnya *financial attitude*

Berdasarkan hasil wawancara awal, pelaku UMKM masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha dan belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Kondisi ini menggambarkan lemahnya kesadaran keuangan yang berdampak langsung terhadap kemampuan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas arus kas dan membuat keputusan keuangan yang tepat.

4. Tingkat adopsi teknologi pembayaran digital berbasis QRIS masih sangat rendah.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bali Bank Indonesia (2025), tingkat adopsi QRIS di Kabupaten Buleleng baru mencapai 7% dari total 911.635 merchant di Bali, sehingga menjadi salah satu yang terendah di antara kabupaten/kota lainnya. Hasil survei awal terhadap 30 pelaku UMKM sektor perdagangan di Buleleng juga menunjukkan hal serupa, di mana hanya 4 pelaku usaha yang telah menggunakan QRIS, sementara 26 lainnya masih mengandalkan transaksi tunai. Rendahnya penggunaan ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman teknis dan kekhawatiran terhadap keamanan data.

5. Inovasi produk UMKM masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara awal, sebagian pelaku UMKM memilih mempertahankan produk yang sudah ada karena keterbatasan modal untuk

melakukan pengembangan produk baru. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa inovasi yang dilakukan tidak sesuai dengan selera pasar sehingga produk baru yang ditawarkan kurang diminati oleh konsumen.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh *financial attitude*, *payment gateway* berbasis QRIS, dan inovasi produk terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini tidak membahas seluruh faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM secara luas, melainkan hanya membatasi pada tiga variabel utama tersebut berdasarkan hasil temuan empiris, observasi lapangan, dan wawancara dengan pelaku UMKM serta pihak lembaga pendukung usaha. Fokus wilayah juga dibatasi pada Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni.

1. Apakah *financial attitude* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah *payment gateway* berbasis QRIS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal berikut.

1. Pengaruh *financial attitude* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Pengaruh *payment gateway* berbasis QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Pengaruh inovasi produk terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi keuangan dan manajemen strategis dalam konteks UMKM, khususnya terkait pengaruh *financial attitude*, *payment gateway* berbasis QRIS, dan inovasi produk terhadap kinerja keuangan, dengan menggunakan pendekatan *Dynamic Capability Theory*.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yakni.

##### a. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta mengembangkan usahanya. Temuan penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, pemanfaatan teknologi, dan penguatan inovasi

usaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga keberlanjutan usahanya.

b. Bagi pemerintah daerah dan instansi pembina UMKM

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program pendampingan, pelatihan, dan kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan kapasitas keuangan dan inovatif UMKM, khususnya di sektor perdagangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini digunakan sebagai pijakan awal untuk mengembangkan kajian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik dari sisi pendekatan metodologis, objek penelitian, maupun variabel lain yang relevan untuk dikaji lebih dalam.

